

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (2/bersambung) **Dana Sosial Dicurigai untuk Pencucian Uang**

SEMARANG— Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mencurigai pos anggaran Dana Sosial di Bank Jateng sebagai tempat pencucian uang belaka. Pasalnya, selain dananya sangat besar, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI penyaluran dana sosial tersebut tidak melalui pengkajian yang mendalam.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**



Jangan-jangan dana sosial di Bank Jateng itu untuk pencucian uang. Anggarannya sangat besar, tapi pencairannya ternyata tidak pernah melalui pengkajian yang mendalam”

EKO HARYANTO
Sekretaris KP2KKN Jateng

“Saya malah curiga, jangan-jangan dana sosial di Bank Jateng itu untuk pencucian uang. Anggarannya sangat besar, tapi pencairannya ternyata tidak pernah melalui pengkajian yang mendalam, sebagaimana temuan BPK RI. Bahkan ada penyaluran dana sosial ke Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Rp 29 miliar yang melanggar aturan,” tegas Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Senin (2/2).

Hal itu diungkapkan Eko Hary-

BANK JATENG BERMASALAH

an-
to setelah menganalisa dan mencermati temuan BPK RI, Atas Operasional Pada PT Bank Jateng tahun 2013 dan 2014 sampai dengan bulan Juli. Dimana berdasarkan LHP yang ditandatangani Ketua BPK Cris Kuntadi No. 446/LHP/BPK/XVIII.SMG/12G2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut, ditemukan penyaluran dana sosial



yang berasal dari penyisihan laba tahun berjalan, tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Dana Sosial.

Menurut Eko Haryanto, apa yang menjadi kecurigaannya itu bukan tanpa alasan. LHP BPK RI sudah sangat jelas dan gamblang membeberkan ketidak beresan pengelolaan Bank Jateng. “Dari LHP BPK tersebut, jelas sekali disampaikan kalau Direktur dan Penanggungjawab Umum Dana

■ Baca DANA...hal 7



Temuan BPK RI terkait dengan Bank Jateng harus diselesaikan secara hukum. Sebelum mengundang Bank Jateng, Komisi C akan menggunakan akuntan publik untuk mencermati laporan keuangannya,”

JAMALUDDIN
Komisi C DPRD Jateng

Dana Sosial Dicurigai untuk Pencucian Uang (lanjutan..)

DANA

Sosial di Sekretaris Perusahaan dalam mengusulkan dana sosial ternyata tidak melakukan kajian kelayakan pemberian bantuan kepada bantuan non kemitraan dan YKK," paparnya.

Seharusnya, pencairan dana sosial untuk bantuan kemitraan dan non kemitraan dimulai dengan adanya pengajuan proposal bantuan dari pemohon yang dikaji dan dievaluasi. Hasil kajian diusulkan ke direksi diteruskan ke pemegang saham pengendali sesuai tingkatan kewenangan.

Selanjutnya dana sosial yang telah digunakan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dengan mengirimkan laporan penggunaan yang dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukungnya.

"Tapi mekanisme itu selama ini kan ternyata tidak berjalan di Bank Jateng. YKK tidak pernah memberikan rencana penggunaan dan sosial, termasuk yang belum digunakan kepada Bank Jateng. Pengawasan yang dilakukan pengelola dana sosial juga hanya sebatas meminta laporan penggunaan dana YKK saja. Namun tidak dilakukan pengawasan terhadap bukti pengeluaran penggunaan dana sosial kepada YKK," tegasnya.

Eko Haryanto juga tidak habis fikir dengan fakta adanya dana sosial yang didepositokan di bank lain, bahkan ada yang di BPR dan koperasi segala. Yaitu di BPR Sar Rp 10 miliar, Bank BJB Rp

1 miliar, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kekar Pulas Rp 1 miliar dan Bank Sahabat Rp 500 juta.

"Ini bagi saya sungguh sangat tidak masuk akal. Memangnya apa kelebihanannya BPR dan KSP Kekar Pulas, sehingga ada dana sosial Bank Jateng yang didepositokan disana," katanya dengan nada heran.

Dengan berbagai kegagalan dan sudah menjadi temuan BPK RI, Eko Haryanto berharap aparat penegak hukum segera bergerak cepat untuk menanganinya. Kalau memang ada unsur pidana, maka harus ditindak tegas. "Temuan terhadap Bank Jateng ini kan tidak sekali ini saja. Tapi sudah berulang kali. Maka harus ada penyelesaian hukum yang tegas," tukasnya.

Sikap tegas juga disampaikan anggota Komisi C DPRD Jateng, Jamaluddin. Berbagai dugaan penyimpangan di Bank Jateng dan menjadi temuan BPK RI diminta diselesaikan secara hukum. Sebab, selama ini penyelesaiannya tidak jelas sama sekali.

"Berbagai temuan BPK RI terkait dengan Bank Jateng harus diselesaikan secara hukum. Biar semuanya jelas," ungkapnya, Senin (2/2).

Menurutnya, langkah itu penting karena temuan terkait Bank Jateng sangat banyak sekali. Kalau terus dibiarkan, justru akan menjadi bom waktu dan merugikan Bank Jateng sendiri.

"Selama ini dewan kan juga tidak pernah mendapatkan penjelasan sama sekali, terkait berbagai temuan itu," katanya.

Politisi dari Magelang ini mengaku akan mendorong komisi C DPRD Jateng untuk memanggil Direksi Bank Jateng. "Kalau perlu sebelum mengundang Bank Jateng, Komisi C menggunakan akuntan publik untuk mencermati laporan keuangan Bank Jateng terlebih dahulu," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengelolaan Bank Jateng selama ini tidak profesional. Berdasarkan LHP BPK RI, penyaluran dana sosial ke YKK sebesar Rp 29 miliar telah melanggar SK Direksi Bank Jateng sendiri.

SK Direktur yang dilanggar itu adalah No.0389/HT.01.01/2010 yang diubah No. 0136/HT.01.01/2013 dan telah diubah lagi dalam SK Direktur No.0113/HT.0101/2014 tanggal 7 Maret 2014. Dimana berdasarkan SK direksi tersebut, dana sosial yang berasal dari penyisihan laba tahun berjalan dialokasikan untuk bantuan kemitraan dan non kemitraan maksimal 70% dan untuk YKK maksimal 30%.

Bahkan Direktur dan Penanggungjawab Umum Dana Sosial di Sekretaris Perusahaan dalam mengusulkan dana sosial ternyata tidak melakukan kajian kelayakan pemberian bantuan kepada bantuan non kemitraan dan YKK. (udi/muz)